

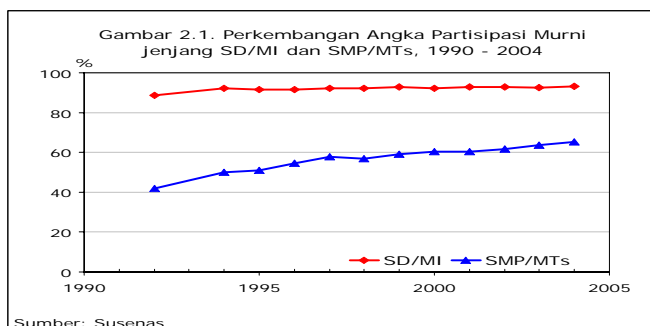
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

Target 3: Menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar (*primary schooling*)

Di Indonesia, sekolah dasar (enam tahun) dan yang sederajat sudah universal dengan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) lebih dari 100 persen pada tahun 1994. Oleh karena itu sejak 1994, target telah ditingkatkan untuk mencapai jenjang pendidikan dasar (sembilan tahun), yang mencakup sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) dan bentuk lain yang sederajat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ditargetkan dapat mencapai APK jenjang SMP/MTs sebesar 90 persen paling lambat pada tahun 2008.

Keadaan dan Kecenderungan

Akses Pendidikan pada Jenjang SD/MI. Data SUSENAS (*National Socio-Economic Survey*) 2004 menunjukkan, angka partisipasi murni (APM) jenjang SD/MI telah mengalami peningkatan dari 88,7 persen pada tahun 1992 menjadi sekitar 93 persen pada 2004 (Gambar 2.1). APM jenjang SD/MI berbeda cukup signifikan dengan APK. Menurut data Depdiknas, pada tahun



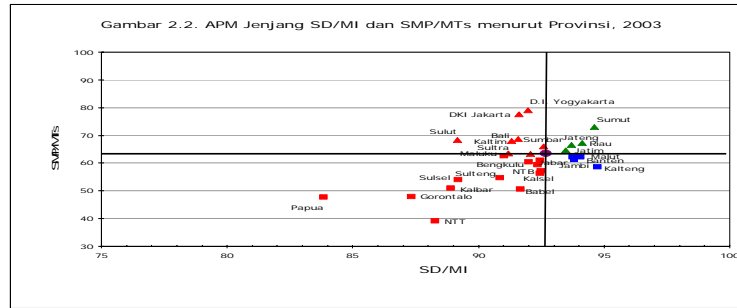
2002 APK SD/MI telah mencapai 112 persen, secara signifikan lebih besar dibanding APM yang baru mencapai 94 persen. Ini menunjukkan, banyak siswa yang berusia di bawah 7 tahun (*underage*) dan di atas 12 tahun (*overage*) yang bersekolah di jenjang SD/MI. Menurut data Depdiknas, siswa SD/MI yang berusia kurang dari 7 tahun sebesar 10,28 persen dan siswa yang berusia di atas 12 tahun sebanyak 4,89 persen.

Ada kecenderungan peningkatan jumlah anak pada usia di bawah 7 tahun yang sudah masuk SD/MI, terutama di daerah perkotaan. Tetapi, banyak pula anak pada usia di atas 12 tahun yang masih di SD/MI, yang disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, mereka masuk SD di atas usia 7 tahun. Pada tahun 2000/2001, dari sebanyak 3.433.220 murid baru kelas I SD/MI, sekitar 42,18 persen berusia 8 tahun ke atas. Kedua, banyak anak yang mengulang kelas sehingga mereka baru dapat menyelesaikan SD pada usia di atas 12 tahun.

Untuk jenjang SD/MI tidak tampak perbedaan partisipasi pendidikan secara signifikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, antara laki-laki dan perempuan, dan antarkelompok ekonomi dalam masyarakat. Meskipun demikian, terungkap pula bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI masih bervariasi antarprovinsi.

Akses Pendidikan pada Jenjang SMP/MTs. Pada jenjang SLTP, APM SMP/MTs mengalami kenaikan dari 41,9 persen pada tahun 1992 menjadi 65,24 persen pada tahun 2004 (Gambar 2.1), sedangkan APK mengalami kenaikan dari 65,7 persen pada tahun 1995 menjadi 81,1 persen pada tahun 2003. Meskipun demikian, angka partisipasi tersebut belum cukup tinggi untuk mencapai APK 90 persen sebagai target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tahun 2008.

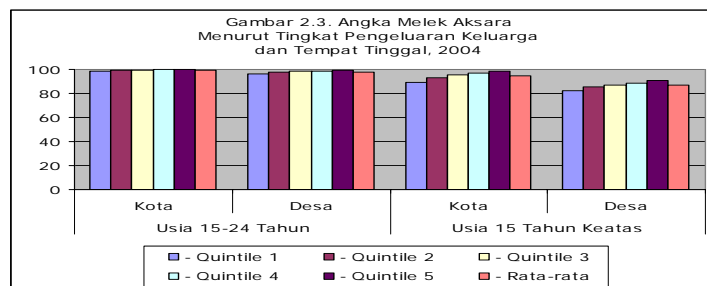
Berbeda dengan jenjang SD/MI, partisipasi pendidikan jenjang SMP/MTs masih menunjukkan perbedaan antarkelompok masyarakat yaitu antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan penduduk miskin serta antarprovinsi. Tetapi, perbedaan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak tampak nyata.



Pada tahun 2004, APM daerah perdesaan baru mencapai 60,1 persen, sementara daerah perkotaan telah mencapai 72,7 persen. Sementara itu, APK di daerah perdesaan adalah sebesar 75,9 persen dan di daerah perkotaan sebesar 91,4 persen. Kesenjangan yang cukup signifikan terjadi antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Pada tahun 2004, APK kelompok 20 persen penduduk termiskin (quintile 1) baru mencapai 63,8 persen, sementara kelompok terkaya (quintile 5) telah mencapai 97,16 persen. Selain itu, partisipasi pendidikan jenjang SMP/MTs sangat bervariasi antardaerah (Gambar 2.2).

Tingkat Keberaksaraan Penduduk. Data SUSENAS 2004 menunjukkan adanya perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk di Indonesia. Secara nasional, tingkat keberaksaraan penduduk usia 15-24 tahun ke atas meningkat dari 96,2 persen pada tahun 1990 menjadi 98,7 persen pada tahun 2004. Meskipun demikian, tingkat keberaksaraan penduduk usia 15-24 tahun itu mengalami stagnasi sejak tahun 1998. Hal ini dikarenakan tingkat keberaksaraan kelompok usia itu sudah sangat tinggi dan penduduk yang masih buta aksara diperkirakan adalah mereka yang berada di daerah yang sulit dijangkau pelayanan pendidikan dan penyandang cacat. Perbaikan tingkat keberaksaraan pada kelompok usia muda disebabkan oleh meningkatnya partisipasi pendidikan dasar serta meningkatnya proporsi siswa SD/MI yang dapat menyelesaikan sekolahnya sampai kelas V.

Dengan cakupan usia yang lebih luas, tampak bahwa angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas lebih rendah jika dibandingkan kelompok usia 15-24 tahun (Gambar 2.3). Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat keberaksaraan kelompok usia lebih tua. Meskipun demikian, tingkat keberaksaraan penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 84,2 persen pada tahun 1995 menjadi 90,38 persen pada tahun 2004. Tetapi, masih terdapat perbedaan tingkat keberaksaraan antarkelompok masyarakat.



Tantangan

Tantangan utama pembangunan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia relatif masih rendah;
- b. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya dapat diatasi dalam pembangunan pendidikan;
- c. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antarkelompok masyarakat, seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan penduduk di perdesaan, dan antardaerah;
- d. Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, terutama di daerah perdesaan, terpencil, dan kepulauan, sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak mengakses layanan pendidikan;
- e. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik;
- f. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien, terutama karena desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai oleh, antara lain, belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan, termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan.

Kebijakan dan Program

Berdasarkan kondisi dan masalah yang dihadapi, ditempuh langkah-langkah kebijakan pendidikan dasar sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi. Mulai tahun ajaran 2005/2006 pemerintah menyediakan biaya operasional sekolah (BOS) dalam jumlah yang cukup besar sebagai langkah awal pelaksanaan pendidikan dasar gratis.
- b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan menerapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dan rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan,
- c. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mencapai angka 20 persen itu, pemerintah telah memberi komitmen meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap. Bahkan selama lima tahun terakhir, alokasi anggaran pendidikan yang disediakan melalui APBN paling tinggi di antara sektor-sektor pembangunan yang lain.
- d. Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam menyelenggaraan pendidikan.
- e. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*) kelembagaan pendidikan.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan dalam

penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat yang mencakup proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Sedangkan program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program layanan pendidikan dasar ini difokuskan pada (i) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapat layanan pendidikan dasar, (ii) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, dan (iii) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.